

SELASA, 16 OKTOBER 2018

POLITIK TANPA INTRIK

Klim politik di Indonesia sedang hangat. Setelah kasus RS yang penuh drama, kini drama baru mengarah ke Jawa Timur, tepatnya ke Malang. Setelah dua eks Kepala Daerah di wilayah Malang Raya tersandung kasus korupsi, yaitu Kota Batu dan Kota Malang, kini bola panas kasus dugaan korupsi mengarah ke Kabupaten Malang. Dana Alokasi Khusus (DAK) konon diduga menjadi penyebabnya. Hebatnya lagi, jika dicermati dari kasus dugaan korupsi di wilayah Malang raya, mereka bertindak sendirian, tanpa melibatkan wakilnya. One man show.

Inilah wajah perpolitikan kita. Ketika nafsu dan ambisi telah memenuhi segenap relung hati, maka korupsi seolah menjadi tradisi. Celakanya lagi, korupsi hanyalah sebagian kecil dari modus dan intrik politik para elite di negeri ini. Modus yang lain sangat beragam jumlahnya, mulai dari menyebar hoax, menjadi pahlawan kesianan hingga intrik curi start kampanye dengan modal baliho atau spanduk besar ucapan selamat yang terpampang di pinggir-pinggir jalan

memprihatinkan, membiaskan makna politik dan mencoreng nilai luhur demokrasi. Politik sejatinya bukan tempat bagi entitas yang tak bermoral. Politik sejatinya adalah cara untuk mencapai tujuan, yang cara-cara itu diwujudkan dengan hal-hal positif. Miris sekali jika melihat kondisi perpolitikan saat ini. Terlebih, dalam dua periode pemilu terakhir, dimana polarisasi dukungan justru menjadi arena untuk terwujudnya perang asimetris. Konflik antar sesame. Yang oleh Snouck Hoongronje dulu disebut dengan politik *devide et impera*. Memecah belah bangsa, menggerogoti kedaulatan negara.

Deklarasi pemilu damai yang beberapa waktu lalu diperkenalkan kepada public, gagal memberikan contoh yang baik, sebab masih ada atribut dan kaos partai berwarna merah dan hijau. Padahal, seharusnya deklarasi pemilu damai tersebut menanggalkan atribut partai. Maka, perlu kita temukan solusi agar bisa mengembalikan makna politik sesuai aslinya. Politik yang tanpa intrik. Politik tanpa drama. Sebab mewujudkan iklim perpolitikan

tidak susah-susah amat. Hanya dibutuhkan ikhtiar terbaik dari para pihak, mulai dari partai politik beserta jajarannya, hingga masyarakat selaku kosntituen dan pemilih suara.

Pertama, moralitas politik. Memisahkan politik dengan moral seperti memisahkan air dengan ikan, mustahil akan tercipta politik yang sehat nan damai, selama moralitas ditanggalkan dalam politik. Moralitas adalah ruh dalam berpolitik. Lihat saja, betapa banyak elite politik di negeri ini yang jatuh karena kehilangan moral dan akal. Bahkan dalam syairnya, Iwan Fals getol menyuarakan agar para wakil rakyat yang terhormat bisa mengurus urusan moral mereka sebelum menciptakan peraturan yang baik. Tak berlebihan memang, sebab Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menyatakan bahwa hukum merupakan bangunan dari moral internal yang dipaksakan untuk dipatuhi.

Ini artinya, sebaik apapun norma hukum yang dibuat, selama masih belum ada moral yang bagus, maka selama itu pula aturan hanya akan menjadi pajangan.



Oleh:

Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH.

Dosen Fakultas Hukum UMM

masyarakat sekarang muncul kalimat, hukum diciptakan untuk dilanggar. Oleh karenanya, sebelum masuk ke dunia politik, sebelum mendaftar sebagai bacaleg dan sebelum dilantik sebagai anggota dewan yang terhormat, baiknya kita benahi dulu moral kita. Tidak akan ada kasus korupsi apalagi OTT Kepala Daerah, jika mereka punya moral yang bagus. Jadikan iklim perpolitikan bangsa ini menjadi sejuk dengan adanya moral.

Kedua, politik yang fair. Sejarah mencatat, perhelatan pemilu tahun 1955 atau pemilu yang pertama kali di Indonesia, berjalan secara aman dan damai.

pemilu 1955 bahkan melabelinya sebagai pemilu yang paling demokratis. Penyebabnya tak lain adalah penyelenggaraan pemilu yang fair. Bebas dari diskriminasi maupun kecurangan. Semua elemen masyarakat yang telah memiliki hak suara, bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Pemerintah saat itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk meraih keuntungan bagi golongan atau partainya sendiri. Fair. Peserta pemilu boleh berasal dari partai ataupun perseorangan. Angka golput rendah. Tidak ada yang curi start kampanye. Semua patuh, semua tertib.

Segyanya kita belajar dari penyelenggaraan pemilu 1955 tersebut. Meskipun tanpa deklarasi pemilu damai dan koar-koar sana sini, toh pemilu berjalan dengan sangat baik saat itu. Tak perlu harus menyebar hoax, apalagi menebar strategi keji untuk menjatuhkan lawan politik. Tak perlu pula terinspirasi strategi kuda troya ala Achilles untuk menembus benteng lawan. Semua kegiatan politik dilaksanakan secara fair, adil, jujur, berintegritas.

dibutuhkan kedewasaan berpolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, bangsa ini muncul sebagai bangsa yang menunjukkan tanda-tanda kekanak-kanakan hanya karena iklim politik yang tidak menentu. Tenaga bangsa ini tergerus habis hanya untuk memikirkan isu-isu liar yang berkembang setiap detik di jagat maya. Maka dibutuhkan kedewasaan. Tidak reaktif. Dari kasus RS, bangsa ini harus belajar bahwa perlu kroscek untuk memvalidasi sebuah kondisi. Dari kasus press release Pertamina soal kenaikan harga BBM yang sejam kemudian dibatalkan, bangsa ini belajar tentang kejelian dan mawas diri.

Selalu ada pelajaran dari setiap peristiwa yang tersaji. Bangsa ini butuh bersikap dewasa. Melihat dariacamata positif. Berkhus-

nudzon. Melalui cara-cara tersebut, semoga bangsa ini bisa melau fase-fase kritis menjelang pemilu tahun 2019 mendatang. Sekalagi, dibutuhkan kerjasama antar para pihak. Intrik dalam politik sudah saatnya kita lewat. Kita songsor era politik sehat. Politik yang bermartabat dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, penanaman moral dan kedewasaan. Sebab, jika berubah adala sebuah keniscayaan, maka bertahan pada kondisi politik yang penuh intrik adala kebinasaan. Mari sama-sama kita berikan edukasi politik yang menarik ba generasi milenial, calc penerus estafet perjuangan bangsa ini. Biarkan mereka menikmati iklim politik yang sehat. Menikmati debat antar kandidat yang santu. Menikmati dinamika politik yang arif. (*)

INFO PENTING PENGIRIMAN OPINI

1. Topik masalah aktual di Malang Raya dan nasional
 2. Panjang tulisan sekitar 850 kata.
 3. Sertakan foto penulis, dalam posisi santai, bukan pas foto.
 4. Nama dan identitas penulis ditulis di bawah judul opini.
 5. Email: redaksi@malang-post.com
- Tulis Judul Opini dalam Subject Email